

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak Restoran memiliki tingkat efektivitas yang tinggi di Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten OKU Timur, Pajak Reklame tidak memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi di 17 Kab/Kota, dan Pajak Penerangan Jalan memiliki efektivitas tinggi di Kabupaten Musi Banyuasin, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki tingkat efektivitas tinggi di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten OKU, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih, sedangkan BPHTB memiliki tingkat efektivitas tertinggi di Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten OKI, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten PALI.
2. Pajak Restoran dan Pajak Reklame tidak memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD dibandingkan dengan pajak lainnya, dimana Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi yang besar di Kabupaten Muara Enim, Kota Lubuklinggau, Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur, Kota Pagar Alam, Kota Palembang, Kabupaten PALI, dan Kota Prabumulih, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berkontribusi besar di Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas Utara, dan Kabupaten OKU Selatan, sedangkan BPHTB berkontribusi besar di Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kabupaten OKI.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan untuk :

1. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan agar dapat mengukur target anggaran sesuai dengan kemampuan pajak daerah yang dapat digali sehingga target tersebut dapat direalisasikan guna meningkatkan efektivitas pajak daerah.
2. Kontribusi pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan masih tergolong kurang berkontribusi terhadap PAD, maka penulis menyarankan agar Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.